

BAB V

KESIMPULAN

Muhammad Mursi merupakan Presiden Mesir yang terpilih secara demokratis pasca Revolusi Mesir tahun 2011 yang menggulingkan kekuasaan Hosni Mubarak. Mursi adalah presiden Mesir pertama yang berasal dari masyarakat sipil. Selama 60 tahun, Mesir dipimpin oleh presiden yang berasal dari kalangan militer. Sehingga menjadikan kekuasaan di Mesir lebih condong ke otoriter.

Presiden Mursi berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Kelompok yang selama ini dikesampingkan oleh pemerintahan Mesir. Namun Pasca revolusi, kelompok ini atau Ikhwanul Muslimin mulai memainkan perannya didalam pemerintahan. Hal tersebut ditunjukkan ketika Ikhwanul Muslimin membentuk partai yang bernama Partai Keadilan dan Kebebasan (*Freedom and Justice Party*). Partai ini ikut berpartisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan pada akhir tahun 2012, dan menghantarkan Mursi terpilih sebagai presiden. Dengan perolehan suara, Mursi meraih 59% suara, sedangkan Ahmad Sjafiq meraih 41% dengan perhitungan suara lebih dari 5 juta suara dihitung. Mursi meraih 2,95 juta dan Ahmad Sjafiq meraih 2,1 juta suara.

Terpilihnya Mursi sebagai presiden, tentunya ada banyak hal yang harus diselesaikan oleh Mursi. Terutama masalah krisis ekonomi yang terjadi pada masa Hosni Mubarak. Pengangguran yang sudah sangat banyak di Mesir serta angka kemiskinan yang sudah sangat tinggi, harus menjadi titik fokus utama Mursi di awal kepemimpinannya.

Dalam setahun pemerintahan Mursi, tidak mengherankan bila kelompok-kelompok yang tidak menyukai kemenangan Mursi melalui partai-partai Islam kemudian bergabung dalam sebuah oposisi. Baik dengan nama Front Penyelamat Nasional, Tamarrud (pemberontak terhadap kekuasaan partai Islam), atau dengan nama lain. Termasuk dalam kelompok oposisi ini adalah militer pada akhirnya. Kelompok-kelompok oposisi inilah yang dalam setahun kekuasaan Presiden Mursi terus mengkritisi jalannya pemerintahan Mursi dari berbagai bentuk. Mulai dari melakukan demonstrasi atas kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh pemerintah, mempengaruhi media, dan pembiaran gangguan keamanan oleh polisi dan militer.

Kondisi ekonomi Mesir masih belum stabil. Sehingga ini menjadi alasan kelompok oposisi untuk menuntut kesejahteraan rakyat yang kemudian menjadi alasan kelompok oposisi untuk menggulingkan kekuasaan Mursi. Dengan melakukan demonstrasi besar-besaran atas ketidakberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam negeri terutama masalah ekonomi.

Pada tanggal 22 November 2012, Mursi mengeluarkan dekrit tentang

pertahanan negara. Namun pengeluaran dekrit tersebut ditentang oleh pihak oposisi dengan melakukan demonstrasi di Lapangan Tahrir Square. Dengan berbagai penolakan dan demonstrasi yang semakin meluas, akhirnya Presiden Mursi membatalkan dekrit tersebut pada tanggal 8 Desember 2012.

Gelombang demonstrasi terus membesar hingga tanggal 30 Juni 2013 merupakan demonstrasi yang paling besar yang pernah ada pada pemerintahan Mursi. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi anarkhis. Di pihak lain, para pendukung Mursi yang menamakan dirinya Tajarrud (keadilan/kejujuran) juga turun ke jalan untuk membela posisi Presiden Mursi.

Massa demonstrasi menuntut dan mendesak agar Mursi turun dari kekuasaannya dengan memberi waktu paling lambat pada tanggal 1 Juli 2013, pukul 17.00 waktu setempat. Situasi para demonstran terus memanas di Lapangan Tahrir Square. Massa anti Mursi menyerbu dan mengobrak-abrik markas utama Ikhwanul Muslimin untuk memaksa Mursi turun. Massa anti-Mursi juga meminta polisi dan aparat militer untuk menyatakan dukungan terhadap gerakan yang disebut kehendak rakyat. Bentrok antara kedua kubu tak terelakkan. Korban tewas berjatuhan. Krisis ini mendorong lima menteri kabinet Mursi mengundurkan diri.

Militer akhirnya turun tangan. Militer memberi ultimatum kepada Presiden Mursi untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan mengajak oposisi selama 48 jam kedepan untuk menstabilkan politik dalam negeri, Namun jika tidak militer akan mengambil alih untuk menyelamatkan negara. Hal ini merupakan permintaan militer untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan memberikan semua

orang 48 jam sebagai kesempatan terakhir melalui televisi yang disiarkan. Ultimatum militer ini dianggap oleh para demonstran dari pihak oposisi ialah sebagai dukungan atas mereka. Jutaan orang turun ke jalan di Kairo juga diikuti di kota-kota besar lainnya seperti Alexandria, Mahalla, dan Suez.

Pada tanggal 3 Juli 2013, pasca ultimatum 48 jam yang dikeluarkan oleh militer. Akhirnya militer Mesir melakukan kudeta atas Presiden Muhammad Mursi. Dengan menahan Mursi dan menangkap para petinggi Ikhwanul Muslimin serta memerintahkan untuk menangkap 300 tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya. Militer juga menutup pemberitaan media-media yang pro terhadap pemerintahan Mursi. Sehingga kudeta yang dilakukan oleh militer semakin menunjukkan kebenarannya dan keberhasilan atas penggulingan kekuasaan tersebut.

Tidak lama setelah kudeta militer berlangsung, jutaan massa pendukung Presiden Mursi langsung menggelar aksi penentangan terhadap kudeta militer, dan penentangan tersebut setiap harinya semakin bertambah banyak. Mereka melakukan aksi demonstrasi yang berpusat di Lapangan Rabi'ah Al Adawiyah.

Keberhasilan kudeta militer terhadap Presiden Mursi di Mesir terdapat beberapa syarat yang terpenuhi. *Pertama*, Militer dapat menempati posisi yang strategis, *Kedua*, Jumlah pasukan yang mendukung kudeta haruslah banyak, baik dari kalangan sipil maupun militer. *Ketiga*, Ketepatan koordinasi yang dilakukan militer sebelum terjadinya kudeta.

Jumlah militer yang cenderung banyak dan tidak ada yang membangkang menjadi militer semakin menunjukkan kekuatannya, terutama untuk menguasai

berbagai tempat dipusat-pusat kota sebelum kudeta dilancarkan. Serta media yang dapat dikuasai oleh militer sehingga mendorong pemberitaan terhadap publik akan pemberitaan kudeta militer.

Dukungan internasional juga ikut berpengaruh terhadap kudeta militer yang ada di Mesir, terutama tidak terlepas dari negara-negara yang mempunyai kepentingan di Mesir. Sehingga kudeta yang terjadi di Mesir terhadap pemerintahan Mursi tidak hanya diinginkan oleh pihak oposisi di dalam negeri tetapi juga pihak-pihak internasional yang mempunyai kepentingan, mengingat bahwa Mesir merupakan negara yang sangat strategis di kawasan Timur Tengah.

Apa yang terjadi di Mesir oleh Presiden Mursi ialah pengulangan dari sejarah sejarah sebelumnya, atas apa yang terjadi pada Raja Farouk, Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat dan Hosni Mubarak. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang berbeda, namun pada pemerintahannya sama-sama menunjukkan ada keterlibatan militer yang sangat kuat. Sejak tahun 1952, kehidupan politik Mesir di kendalikan oleh militer. Sehingga tidak heran jika militer masih memegang kendali Mesir sampai saat ini.